E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Strategi Pendidikan Politik Menyongsong Pemilu 2024: Studi Kasus Peningkatan Indeks Demokrasi di Provinsi Banten

Moh.Fikri Tanzil Mutaqin[1], Febri Saefulloh[2], Teguh Aris Munandar[3], Agung Tesa Gumilar[4], Titi Alawiyah[5]

[1]Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, fikritanzil@untirta.ac.id
[2]Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, febrisaefulloh@untirta.ac.id
[3]Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, teguharis86@untirta.ac.id
[4]Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, agung.tesa@untirta.ac.id
[5]Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, titi.alawiyah@untirta.ac.id

Abstrak

Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten dari 75,93 pada 2021 menjadi 78,75 pada 2022 menyimpan paradoks yang tidak bisa diabaikan: di balik capaian agregat yang membaik, terdapat ketimpangan struktural antara pendidikan politik kader partai yang sempurna (skor 100,00) dengan netralitas penyelenggara pemilu yang berada pada titik nadir (skor 0,00) selama dua tahun berturut-turut. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pendidikan politik yang diterapkan di Provinsi Banten dalam menyongsong Pemilu 2024, dengan fokus khusus pada adaptasi pendekatan untuk segmen pemilih yang beragam: pemilih muda Milenial dan Gen Z yang mendominasi 61,62% DPT, masyarakat adat Kasepuhan Citorek, pemilih perempuan, dan kelompok disabilitas. Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui studi literatur, studi dokumentasi, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan para pemangku kepentingan. Analisis data menggunakan model berlapis yang mencakup analisis kebijakan, fenomenologi, wacana, konten, dan historis-yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendidikan politik di Banten selama ini terjebak pada paradigma konservatif-liberal yang bersifat elitis dan satu arah, sehingga gagal menjangkau akar rumput secara inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi menuju paradigma pendidikan politik kritis yang emansipatoris, berbasis literasi digital, dan adaptif terhadap karakteristik sosiologis tiap segmen pemilih adalah prasyarat mutlak untuk mencapai target IDI Banten 80,05 pada tahun 2026 secara substantif.

Kata Kunci: *Pendidikan Politik; Indeks Demokrasi Indonesia; Pemilu 2024; Literasi Digital; Paradigma Kritis.*

Abstract

The simultaneous general elections (Pemilu) and regional elections (Pemilukada) of 2024 in Banten Province present a clear democratic irony: the quantitative increase of legislative candidates from 85 to 100 seats has not been matched by a corresponding growth in their political awareness. This study aims to analyze the level of political awareness among legislative candidates (caleg) in Banten Province and the adaptive strategies they employ in response to structural challenges in the 2024 electoral contest. A qualitative approach utilizing a case study method was employed to explore this phenomenon in depth. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis of 12 candidate informants from various political parties across the Millennial and Gen Z generations, selected through purposive sampling in Serang City, Banten Province. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, validated through source and technique triangulation. The findings reveal two dominant structural challenges: the hegemony of high cost politics that marginalizes intellectual capital, and a political awareness deficit at both the candidate and voter levels. Conversely, adaptive strategies were identified, including social media utilization as a low-cost campaign instrument, local wisdom approaches, and religious symbolism. This study concludes that enhancing political awareness requires a fundamental transformation in the role of political parties, from mere electoral vehicles to substantive political education institutions through structured and sustained mentoring and cadre development.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Keywords: *Political Education; Indonesia Democracy Index; 2024 Election; Digital Literacy; Critical Paradigma.*

Corresponding Author:
Moh.Fikri Tanzil Mutaqin
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, fikritanzil@untirta.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam ekosistem negara demokrasi, pemilihan umum (pemilu) bukan sekadar ritual prosedural lima tahunan, melainkan manifestasi tertinggi dari kedaulatan rakyat untuk menentukan arah kebijakan publik dan sirkulasi kepemimpinan. Afandi dan Suryadi (2011) mengingatkan bahwa efektivitas demokrasi sangat bergantung pada sejauh mana warga negara tidak hanya hadir secara fisik dalam proses pemilihan, tetapi juga hadir secara intelektual dan etis sebagai pemilih yang kritis. Namun, realitas demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi masih dihadapkan pada tantangan fluktuasi partisipasi yang sering kali berbanding lurus dengan penurunan kualitas. Muhamad Afied Hambali (2014) mencatat bahwa pemilu Indonesia pasca-Reformasi masih mengalami permasalahan struktural berupa money politics, golongan putih (golput), dan kampanye hitam yang mencederai integritas proses elektoral. Tantangan ini semakin kompleks di era disrupsi teknologi, di mana minimnya literasi digital menyebabkan masyarakat mudah terpapar informasi hoaks yang memicu polarisasi dan melemahkan basis rasionalitas pemilih. Oleh karena itu, pendidikan politik bukan hanya instrumen mobilisasi suara, melainkan kebutuhan mendesak untuk membentuk warga negara yang kritis, terinformasi, dan bertanggung jawab secara etis terhadap pilihan politiknya.

Provinsi Banten menjadi laboratorium politik yang menarik sekaligus problematis untuk dikaji dalam konteks Pemilu 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (2023), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) wilayah ini menunjukkan tren pemulihan dari 75,93 pada 2021 menjadi 78,75 pada 2022, mendekati target Rencana Pembangunan Daerah sebesar 80,05% pada tahun 2026. Namun, apabila dibedah menggunakan indikator mikro, kenaikan agregat ini menyembunyikan paradoks yang mengkhawatirkan. Indeks pendidikan politik pada kader partai politik mencapai skor sempurna (100,00), namun indikator "netralitas penyelenggara pemilu" berada pada titik nadir (0,00) selama dua tahun berturut-turut, sebuah anomali yang menunjukkan bahwa pendidikan politik selama ini sukses mencetak kader internal partai yang sadar politik, tetapi gagal membangun ekosistem pemilu yang netral dan adil bagi publik luas. Disparitas ini mengonfirmasi tesis Nurdiansyah (2015) bahwa pendidikan politik yang bersifat eksklusif di lingkaran partai tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas demokrasi substantif di tingkat akar rumput.

Urgensi penguatan pendidikan politik di Banten semakin mendesak jika ditinjau dari struktur demografis pemilih. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten (2023) mencatat total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 8.842.646 jiwa, dengan dominasi Generasi Milenial sebesar 40,04% (3.540.864 pemilih) dan Generasi Z sebesar 21,58% (1.908.605 pemilih). Gabungan keduanya mencapai 61,62%, menempatkan Banten dalam fase youth bulge yang secara demografis berpotensi besar, namun secara politis penuh risiko. Center for Strategic and International Studies (2022) mencatat bahwa partisipasi pemilih muda pada Pemilu 2019 meningkat secara kuantitatif, namun peningkatan ini belum disertai dengan kedewasaan pemilih yang memadai. Pemilih pemula, sebagaimana didefinisikan dalam UU Pemilu Pasal 198 ayat 1, memiliki karakteristik yang ambigu: antusiasme tinggi namun kecenderungan kurang rasional, rentan terhadap tekanan lingkungan, dan mudah terjebak pada sikap apatis jika aspirasi mereka tidak terakomodasi (Ardiansyah dkk., 2015). Tanpa

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

intervensi pendidikan politik yang tepat sasaran, bonus demografi ini berisiko bermetamorfosis menjadi bencana demokrasi berupa pragmatisme massal.

Kompleksitas lanskap politik Banten tidak berhenti pada persoalan generasional. Listiyaningsih (2010) mengingatkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen daerah masih jauh dari ideal akibat konstruksi sosial yang menempatkan politik sebagai ranah maskulin yang penuh intrik, sehingga membatasi ruang gerak perempuan untuk berpartisipasi lebih dari sekadar pemberi suara. Data menunjukkan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Banten baru menyentuh 17,65% pada 2021, jauh di bawah kuota afirmatif 30% yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di sisi lain, keberadaan masyarakat adat seperti Kasepuhan Citorek di Kabupaten Lebak menambah lapisan kompleksitas tersendiri; komunitas ini memiliki pola perilaku memilih yang sangat dipengaruhi oleh faktor historis dan kepatuhan pada tokoh adat, namun kini mulai terpapar keterbukaan informasi melalui media digital (Bahar, 2008). Triaditya Rahman Hamid (2022) menambahkan dimensi lain yang sering terabaikan: sebanyak 29.404 pemilih penyandang disabilitas di Banten tidak hanya menghadapi hambatan aksesibilitas fisik, tetapi juga hambatan aksesibilitas kognitif berupa minimnya materi sosialisasi dalam format yang ramah disabilitas, sehingga kelompok ini mengalami information blackout yang sistematis.

Pendidikan politik (political education) tidak dapat dipahami sekadar sebagai transfer pengetahuan mengenai struktur pemerintahan, melainkan sebuah proses sistematis untuk membentuk orientasi politik individu. Secara terminologis, Kartini Kartono mendefinisikannya sebagai aktivitas pendidikan yang bertujuan membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis dan moral dalam pencapaian tujuan politik bangsa. Rusadi Kantaprawira memperluas definisi ini dengan menekankan pada peningkatan kapasitas pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat (Afandi & Suryadi, 2011). Sementara itu, Quraishi dan Rahman dalam Dudih Sutrisman (2019) merumuskan pendidikan politik sebagai upaya menciptakan kesadaran kritis terhadap fenomena politik melalui diskusi dan analisis yang terbuka dan seimbang, dengan landasan ideologi demokrasi yang mendasari pilihan politiknya. Keragaman definisi ini mencerminkan bahwa pendidikan politik bukan sekadar penggabungan dua kata, melainkan entitas konseptual yang jauh lebih luas dari sekadar mengenal prosedur pemungutan suara.

Dalam perspektif yang lebih kritis, pendidikan politik berkorelasi erat dengan konsep conscientization (penyadaran) dalam pemikiran Paulo Freire. Fadli (2020) menjelaskan bahwa Freire memandang pendidikan sebagai instrumen untuk membebaskan manusia dari belenggu realitas sosial yang menindas; pendidikan harus menciptakan kesadaran kritis (critical consciousness) di mana individu tidak lagi menerima realitas politik sebagai "takdir" (kesadaran magis), melainkan mampu menganalisis kausalitas sosial-politik yang membentuknya. Dalam konteks demokrasi elektoral, kesadaran kritis ini menjadi prasyarat mutlak agar pemilih tidak terjebak pada pragmatisme politik uang atau mobilisasi emosional semata. Alparizi dan Majid (2021) menambahkan bahwa pendidikan emansipatoris sebagaimana dikonsepsikan Freire harus menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk menafsirkan arti nyata dalam kehidupannya sendiri, sebuah dimensi yang sering absen dalam model pendidikan politik yang birokratis dan top-down. Gabriel Almond dalam Mas'oed (1986) menyambung perspektif ini dengan menekankan bahwa pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai yang menunjukkan bagaimana seharusnya masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya.

Efektivitas pendidikan politik sangat bergantung pada paradigma yang melandasinya. Literatur mencatat adanya kontestasi antara tiga paradigma utama. Paradigma konservatif memandang ketidaksederajatan sosial sebagai hukum keharusan alami yang tidak dapat diubah, sehingga rakyat diposisikan sebagai objek pasif yang harus menerima nasib. Dalam

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

pandangan ini, lembaga pendidikan dibentuk untuk memelihara status quo, dan pendidikan politik hanya dimaknai sebagai kepatuhan prosedural semata. Paradigma liberal mengakui adanya masalah sosial dan berupaya mengatasinya melalui reformasi institusional dan peningkatan kapasitas individual dalam kompetisi yang adil. Fokusnya pada rasionalitas dan prestasi individual, namun abai terhadap struktur dominasi kelas dan budaya yang menghambat akses kelompok marjinal meskipun secara prosedural mereka memiliki hak yang sama. Paradigma kritis, yang menjadi antitesis keduanya, memandang pendidikan sebagai arena perjuangan politik untuk melakukan transformasi sosial secara fundamental. Visi utamanya adalah menciptakan ruang refleksi kritis terhadap dominant ideology dan memberdayakan kaum tertindas untuk memperjuangkan sistem sosial yang lebih adil (Fakih dkk., 1999). Dalam konteks Banten, pergeseran dari paradigma konservatif-liberal menuju paradigma kritis menjadi urgensi yang tidak bisa ditunda untuk mengatasi stagnasi kualitas demokrasi.

Tujuan akhir dari pendidikan politik adalah partisipasi politik yang berkualitas. Gabriel Almond (dalam Mas'oed, 1986) menegaskan bahwa pendidikan politik berfungsi membentuk nilai-nilai yang menuntun bagaimana seharusnya masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Surbakti (2010) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, baik dengan memilih pimpinan negara maupun dengan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam studi perilaku pemilih, Ardiansyah dkk. (2015) mengklasifikasikan pemilih ke dalam tiga tipologi: pemilih rasional yang menentukan pilihan berdasarkan analisis mendalam terhadap program dan rekam jejak kandidat; pemilih kritis-emosional yang memiliki idealisme tinggi namun keputusannya bercampur dengan ikatan emosional; dan pemilih pemula yang memiliki antusiasme tinggi namun minim pengalaman dan rentan terombang-ambing oleh tekanan lingkungan. Pemahaman terhadap tipologi ini krusial dalam merancang strategi pendidikan politik yang tepat sasaran.

Pembentukan preferensi politik pemilih, khususnya pemilih pemula, sangat dipengaruhi oleh tiga agen sosialisasi utama yang dapat disebut sebagai "Tri Sentra Pendidikan Politik". Pertama, keluarga sebagai laboratorium demokrasi pertama; jika dalam keluarga terjadi diskusi terbuka mengenai isu-isu publik, anak akan tumbuh menjadi pemilih yang rasional, dan sebaliknya. Kedua, institusi pendidikan yang harus melampaui sekadar pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang bersifat teoretis; Fajar (2014) menekankan bahwa sekolah harus menjadi wahana simulasi demokrasi yang mendorong kesadaran siswa secara aktif. Ketiga, tokoh masyarakat yang di Banten masih menjadi referensi utama, termasuk figur keagamaan dan tokoh adat yang memiliki otoritas karismatik dalam mengarahkan preferensi politik komunitasnya. Sinergi antara ketiga sentra ini menjadi kunci ekosistem demokrasi yang sehat; jika satu elemen gagal, mata rantai pendidikan politik akan terputus dan vakum tersebut akan diisi oleh aktor-aktor dengan kepentingan pragmatis.

Berdasarkan paradoks IDI dan kompleksitas demografis yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pendidikan politik yang diterapkan di Provinsi Banten menjelang Pemilu 2024, sekaligus merumuskan pendekatan yang adaptif terhadap keragaman sosiologis segmen pemilihnya sebagai instrumen substantif peningkatan kualitas demokrasi daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pilihan ini dilandasi oleh tujuan penelitian yang berupaya menggali pemaknaan mendalam mengenai realitas pendidikan politik dari perspektif subjektif berbagai aktor, mulai dari pemilih pemula, tokoh adat, pemilih perempuan, hingga penyelenggara pemilu. Creswell

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

(2015) menjelaskan bahwa pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti menemukan esensi dari pengalaman hidup sehari-hari responden dalam berinteraksi dengan isu yang diteliti, melampaui sekadar data statistik. Penelitian ini tidak berupaya mengeneralisasi temuan secara statistik, melainkan mengonstruksi pemahaman yang kaya dan kontekstual tentang bagaimana pendidikan politik terbentuk, diterima, dan diimplementasikan di berbagai segmen masyarakat Banten yang memiliki karakteristik sosiologis dan psikologis yang berbeda-beda.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik yang saling melengkapi. Pertama, studi literatur yang menganalisis kerangka konseptual dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi untuk menemukan gap analysis terkait pendidikan politik lokal. Kedua, studi dokumentasi yang berfokus pada pengumpulan data sekunder berupa laporan IDI dari BPS Banten, data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari KPU Banten, dan regulasi daerah yang relevan. Ketiga, wawancara mendalam semi-terstruktur (in-depth interview) yang melibatkan informan kunci, yaitu tokoh Kasepuhan Citorek, perwakilan organisasi perempuan, dan pemilih muda perkotaan; metode ini memungkinkan eksplorasi gagasan responden secara fleksibel namun tetap terarah pada tema partisipasi politik. Keempat, Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan para ahli (expert judgement) untuk membedah isu spesifik dan merumuskan strategi resolusi dalam konteks demokrasi Banten.

Analisis data menggunakan model kualitatif berlapis (multi-layered analysis) yang mencakup lima teknik spesifik: analisis kebijakan untuk menelaah konsistensi regulasi dengan implementasi di lapangan; analisis fenomenologi untuk menemukan esensi pengalaman responden; analisis wacana untuk membaca pesan ideologis dalam narasi kampanye dan sosialisasi; analisis konten terhadap pemberitaan media dan dokumen publik; serta analisis historis-yuridis untuk memahami konteks sejarah perilaku politik masyarakat Banten. Validitas data ditempuh melalui triangulasi sumber dan metode, diperkuat dengan tahapan pengkodean sistematis mulai dari open coding, axial coding, hingga selective coding untuk mengonstruksi tema-tema utama pembahasan. Interpretasi akhir dilakukan untuk menyintesis seluruh temuan menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi peningkatan kualitas demokrasi di Provinsi Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradoks IDI Banten: Antara Capaian Prosedural dan Defisit Substantif

Analisis terhadap data IDI Provinsi Banten mengungkap fakta yang lebih kompleks dari sekadar angka agregat yang membaik. Tabel 1 di bawah memperlihatkan disparitas yang dramatis antara kemapanan infrastruktur politik formal dengan kebebasan sipil dan netralitas penyelenggaraan di lapangan.

Tabel 1. Disparitas Capaian Indikator IDI Provinsi Banten Tahun 2021-2022

Indikator Variabel Demokrasi	Skor 2021	Skor 2022	Keterangan Analitis
Pendidikan politik pada kader partai politik	100,00	100,00	Sangat Baik — capaian paripurna, namun eksklusif di lingkaran internal partai
Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik	100,00	100,00	Sangat Baik — indikator prosedural formal terpenuhi
Kinerja lembaga legislatif	28,57	100,00	Peningkatan drastis — perlu kajian lebih lanjut tentang substansi kinerja
Kebebasan berkeyakinan	100,00	92,33	Tren menurun — potensi regresi kebebasan sipil

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Putusan PTUN terkait kebijakan pejabat	94,44	55,56	Penurunan drastis — kepatuhan hukum pejabat publik melemah signifikan
Netralitas penyelenggara pemilu	**0,00**	**0,00**	**SANGAT KRITIS — titik nadir dua tahun berturut-turut, kontras dengan skor kader partai**

Sumber: Diolah dari data BPS Provinsi Banten (2023)

Data pada Tabel 1 memperlihatkan kontradiksi yang tidak bisa ditutupi oleh angka agregat IDI yang membaik. Skor sempurna (100,00) pada indikator pendidikan politik kader partai dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik mengindikasikan bahwa infrastruktur formal demokrasi berfungsi dengan baik pada level prosedural. Namun, skor 0,00 yang bertahan selama dua tahun berturut-turut pada indikator netralitas penyelenggara pemilu adalah alarm keras yang tidak dapat diabaikan: lembaga yang seharusnya menjadi wasit netral dalam kontestasi elektoral terdeteksi tidak mampu atau tidak mau menjalankan fungsinya secara imparsial. Penurunan skor kebebasan berkeyakinan dari 100,00 menjadi 92,33 dan anjloknya skor putusan PTUN dari 94,44 menjadi 55,56 memperkuat temuan ini; keduanya mengindikasikan adanya regresi dalam aspek kebebasan sipil dan kepatuhan hukum pejabat publik. Kesimpulan yang dapat ditarik dengan tegas adalah bahwa model pendidikan politik yang berlaku saat ini berhasil memproduksi kader-kader partai yang secara prosedural melek politik, namun gagal membangun budaya demokrasi substantif yang menjamin netralitas dan integritas proses elektoral secara menyeluruh.

Bonus Demografi: Antara Potensi Partisipasi dan Kerentanan Pragmatisme

Struktur pemilih Banten menjelang Pemilu 2024 menempatkan generasi muda pada posisi demografis yang belum pernah ada sebelumnya. Tabel 2 memperlihatkan distribusi DPT berdasarkan generasi yang menjadi basis utama perumusan strategi pendidikan politik.

Tabel 2. Distribusi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Banten Berdasarkan Generasi

Kategori Generasi	Rentang Tahun Lahir	Jumlah Pemilih	Persentase
Pre-Boomer	< 1945	76.195	0,86%
Baby Boomer	1946 – 1964	902.513	10,21%
Gen X	1965 – 1980	2.414.469	27,30%
Milenial	**1981 – 1996**	**3.540.864**	**40,04%**
Gen Z	**1997 – 2012**	**1.908.605**	**21,58%**
Total		**8.842.646**	**100%**

Sumber: KPU Provinsi Banten (2023)

Dengan gabungan Milenial dan Gen Z mencapai 61,62% dari total pemilih, Banten berada dalam fase youth bulge yang secara demografis adalah peluang historis, namun secara politis adalah medan yang penuh risiko tanpa intervensi pendidikan yang tepat. Studi lapangan menemukan karakteristik ambivalen yang menonjol pada kelompok ini: di satu sisi terdapat antusiasme dan keterbukaan informasi yang tinggi berkat eksposur media sosial, di sisi lain terdapat kerentanan serius terhadap disinformasi, kampanye hitam, dan praktik money politics. Laksmitha dan Susanto (2019) mencatat bahwa partisipasi politik generasi Milenial meningkat berkat aktivitas di media sosial, seperti aksi dukung-mendukung melalui foto di Instagram atau penandatanganan petisi daring. Namun, Susanto dan Irwansyah (2021) mengingatkan sisi gelapnya: minimnya literasi digital dan lemahnya proses konfirmasi (check and recheck) menyebabkan ekosistem informasi rentan tercemar oleh

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

hoaks yang menciptakan echo chamber dan polarisasi sosial yang tajam. Oleh karena itu, strategi pendidikan politik bagi segmen ini tidak cukup hanya soal cara mencoblos; ia harus mencakup literasi digital kritis yang membekali pemilih dengan kemampuan memverifikasi sumber berita dan mengenali propaganda siber (cyber-propaganda).

Hegemoni Kultural dan Politik Pesantren: Figur sebagai Penentu Arah Suara

Lanskap politik Banten tidak dapat dipahami tanpa menempatkan institusi pesantren dan figur kiai sebagai variabel yang determinan. Masyhud (2003) mencatat bahwa pesantren di Banten memiliki fungsi ganda yang strategis: sebagai lembaga pendidikan agama sekaligus simpul kekuatan politik elektoral. Dalam konteks Pemilu 2024, figur kiai masih memegang otoritas karismatik yang kuat dalam mengarahkan preferensi politik santri dan masyarakat sekitar. Fenomena ini menciptakan pola hubungan patron-klien yang unik, di mana kepatuhan santri kepada pimpinan pesantren sering kali berimplikasi pada penyeragaman suara (block voting) yang menghapus dimensi kemandirian pilihan politik individu. Isnaini dan Rasmuin (2022) menemukan bahwa pesantren yang mampu menjalankan pendidikan politik substantif justru menghasilkan santri yang lebih kritis dan tidak mudah dimobilisasi secara transaksional. Tantangan terbesarnya adalah menggeser budaya pragmatis di mana kandidat sering hanya datang membawa bantuan materi menjelang pemilu, menjadi pendekatan yang berbasis pada visi-misi dan nilai-nilai kebangsaan yang diuji secara kritis oleh komunitas pesantren.

Temuan lapangan dari studi kasus masyarakat adat Kasepuhan Citorek memberikan perspektif yang lebih nuansir. Berbeda dari asumsi bahwa komunitas adat bersifat resistif terhadap modernitas, penelitian ini menemukan pola hibriditas yang menarik. Masyarakat Citorek mulai terbuka terhadap informasi politik melalui internet yang diakses kalangan mudanya, namun keputusan akhir dalam memilih masih sangat dipengaruhi oleh preferensi tokoh adat (kasepuhan) dan faktor historis kedekatan kandidat dengan wilayah tersebut. Seorang narasumber pemuda Citorek menyatakan bahwa pemahaman politik masyarakat sudah mulai dinamis, beralih dari sekadar mengenal pemilihan kepala desa menuju pemahaman tentang pemilu di berbagai tingkatan karena adanya media informasi politik (Wawancara, Juli 2023). Sementara itu, masyarakat yang sudah mulai menerima keterbukaan informasi cenderung memilih berdasarkan rekam jejak historis calon yang erat dengan Citorek, karena kedekatan tersebut dianggap lebih dapat dipercaya dan berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif (Wawancara, Juli 2023). Temuan ini mengonfirmasi bahwa di wilayah adat, influencer politik yang paling efektif bukanlah media sosial, melainkan tokoh adat itu sendiri; dengan implikasi bahwa strategi pendidikan politik harus menjadikan tokoh adat sebagai mitra sosialisasi, bukan objek target semata.

Inklusivitas: Defisit Representasi Perempuan dan Hak Politik Penyandang Disabilitas

Kualitas demokrasi yang substantif tidak bisa diukur hanya dari partisipasi mayoritas; ia harus mencerminkan sejauh mana sistem mampu mengakomodasi kelompok yang selama ini termarginalkan. Pada segmen perempuan, disparitas keterwakilan antara Kota Tangerang Selatan yang mencapai 30,00% (ideal) dengan Kabupaten Lebak yang hanya mencapai 8,00% memberikan pelajaran penting tentang kontekstualisasi strategi. Listiyaningsih (2010) berargumen bahwa hambatan utamanya bukan ketidakmampuan teknis perempuan, melainkan konstruksi sosial dan stereotip budaya yang melabeli politik sebagai ranah yang keras, penuh intrik, dan tipu daya, sehingga perempuan enggan melibatkan diri lebih jauh. Temuan FGD mengonfirmasi bahwa di wilayah selatan Banten, pendekatan afirmatif harus lebih persuasif dengan melibatkan tokoh agama dan adat untuk melegitimasi peran publik perempuan, sedangkan di wilayah utara, fokus dapat diarahkan pada penguatan kapasitas teknis legislasi. Strategi yang seragam (one size fits all) tidak hanya tidak efektif, tetapi kontraproduktif dalam konteks heterogenitas sosiologis Banten.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Kelompok penyandang disabilitas yang berjumlah 29.404 pemilih menghadapi tantangan yang berdimensi ganda. Triaditya Rahman Hamid (2022) menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas tidak hanya terjadi pada saat pemberian suara (voting), tetapi juga pada proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan (policy making). Temuan riset menunjukkan bahwa materi sosialisasi pemilu sering tidak tersedia dalam format Braille atau video bahasa isyarat yang memadai, sehingga kelompok ini mengalami information blackout yang sistematis. Keragaman jenis disabilitas yang mencakup disabilitas fisik (12.686 jiwa), mental (6.451 jiwa), sensorik wicara (3.684 jiwa), sensorik netra (3.529 jiwa), sensorik rungu (1.622 jiwa), dan intelektual (1.432 jiwa) menuntut pendekatan fasilitas dan edukasi yang spesifik, tidak bisa digeneralisasi. Di luar penyandang disabilitas, terdapat pula 11.606 pemilih di lokasi khusus seperti rumah tahanan, panti sosial, daerah konflik, dan relokasi bencana yang memerlukan strategi jemput bola untuk memastikan hak konstitusional mereka tidak tereduksi oleh kendala administratif dan isolasi informasi.

Strategi Transformasi: Dari Paradigma Elitis menuju Pendidikan Politik Kritis

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat diformulasikan bahwa kegagalan pendidikan politik di Banten bersumber dari dominasi paradigma konservatif-liberal yang bersifat satu arah, birokratis, dan elitis. Paradigma konservatif terlihat pada pola sosialisasi ceramah di mana masyarakat diposisikan sebagai objek pasif penerima informasi tanpa daya tawar. Pendekatan liberal terlihat pada fokus yang berlebihan terhadap prosedur teknis pencoblosan namun abai terhadap struktur ketimpangan sosial yang memengaruhi partisipasi. Untuk mencapai lonjakan kualitas demokrasi pada 2026, Banten membutuhkan transformasi menuju paradigma pendidikan politik kritis. Dalam perspektif Freire, pendidikan politik kritis adalah proses penyadaran untuk membongkar struktur ketidakadilan, politik uang, dan hegemoni elite; ia menuntut adanya ruang dialogis di mana pemilih pemula, perempuan, dan masyarakat adat diajak merefleksikan realitas sosial mereka dan memahami bahwa partisipasi politik adalah alat mengubah nasib kolektif, bukan sekadar ritual lima tahunan. Wayan Sohib (2009) menegaskan bahwa hakikat pendidikan politik adalah proses pendewasaan diri untuk memikul tanggung jawab mentalitas dan etika dalam berpolitik, sebuah dimensi yang mensyaratkan keberanian institusional untuk melampaui sekadar sosialisasi teknis.

Transformasi paradigma ini memiliki implikasi operasional yang konkret pada setidaknya empat arena. Pertama, revitalisasi Tri Sentra Pendidikan Politik melalui pemberdayaan keluarga, sekolah, dan tokoh masyarakat sebagai agen literasi, bukan agen mobilisasi. Kedua, integrasi literasi digital kritis dalam kurikulum pendidikan politik yang mengajarkan kemampuan memverifikasi fakta (fact-checking) dan mengenali propaganda siber, karena tanpa imunitas digital, partisipasi politik yang tinggi di media sosial hanya menjadi kebisingan yang kontraproduktif bagi demokrasi. Ketiga, strategi kontekstual-geografis yang membedakan pendekatan afirmatif di wilayah dengan hambatan budaya tinggi (seperti Lebak dan Pandeglang) dari pendekatan penguatan kapasitas teknis di wilayah urban (seperti Tangerang Raya). Keempat, pelembagaan pendidikan politik sebagai program berkelanjutan, bukan sekadar proyek musiman menjelang pemilu, dengan mengalihkan fokus anggaran dari penguatan internal partai semata menuju pemberdayaan komunitas basis, termasuk pesantren, kelompok perempuan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas. Tanpa keempat transformasi ini, target IDI Banten 80,05 pada 2026 akan menjadi angka yang diraih melalui manipulasi statistik, bukan cerminan nyata dari kualitas demokrasi yang tumbuh di akar rumput.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kenaikan agregat IDI Provinsi Banten menyembunyikan paradoks fundamental yang menuntut evaluasi menyeluruh. Capaian sempurna pada indikator pendidikan politik kader partai tidak berkorelasi dengan perbaikan di aspek yang jauh lebih fundamental, yakni netralitas penyelenggara pemilu dan kebebasan sipil di akar rumput. Studi ini menegaskan bahwa pendidikan politik di Banten selama ini terjebak pada paradigma konservatif-liberal yang bersifat elitis dan sentralistik, berhasil mencetak kader partai yang sadar secara prosedural, namun gagal membangun ekosistem demokrasi yang inklusif dan adil bagi masyarakat luas. Model one size fits all tidak lagi relevan mengingat kompleksitas dan heterogenitas sosiologis lanskap politik Banten, yang menuntut pendekatan yang adaptif dan kontekstual terhadap karakteristik spesifik tiap segmen pemilih.

Dominasi pemilih muda Milenial dan Gen Z yang mencapai 61,62% dari total DPT membawa implikasi serius bagi strategi komunikasi politik. Metode sosialisasi konvensional tidak efektif dalam merangkul kelompok ini yang memiliki karakteristik kritis namun rentan apatis dan mudah terpapar disinformasi. Temuan ini mengharuskan pendidikan politik bertransformasi ke ranah digital berbasis literasi kritis, bukan sekadar kampanye media sosial yang bersifat seremonial. Pada aspek sosial-kultural, temuan mengenai hibriditas masyarakat adat Kasepuhan Citorek memberikan perspektif bahwa komunitas tradisional sesungguhnya tidak anti-demokrasi, melainkan membutuhkan pendekatan yang menghormati otoritas tokoh adat sebagai mitra strategis sosialisasi. Sementara itu, rendahnya partisipasi perempuan dan diabaikannya hak politik penyandang disabilitas bukan karena ketidakmampuan teknis, melainkan akibat hambatan struktural budaya dan aksesibilitas kognitif yang harus diatasi melalui strategi afirmatif yang terencana.

Rekomendasi akhir penelitian ini terarah pada perlunya transformasi paradigma pendidikan politik di Banten dari konservatif-liberal menuju kritis-emansipatoris. Pemangku kebijakan, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Banten, perlu mereformasi kurikulum dan pendekatan pendidikan politik menjadi gerakan emansipatoris yang membebaskan pemilih dari belenggu ketidaktahuan dan intimidasi struktural. Sumber daya harus dialihkan dari penguatan eksklusif kader partai menuju pemberdayaan komunitas basis melalui revitalisasi Tri Sentra Pendidikan Politik, integrasi literasi digital kritis, dan program inklusif bagi perempuan, masyarakat adat, serta penyandang disabilitas. Hanya dengan cara inilah target IDI 80,05 pada tahun 2026 dapat dicapai secara substantif sebagai cerminan nyata dari warga negara yang berdaya, bukan sekadar manipulasi statistik.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, I., & Suryadi, K. (2011). Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik. Bandung: UPI Press.

Alparizi, P., & Majid, A. N. (2021). Pendidikan Emansipatoris dalam Perspektif Paulo Freire dan Muhammad Abduh. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(9).

Ardiansyah, A., dkk. (2015). Sikap Pemilih Pemula Terhadap Calon Kepala Daerah Ditinjau dari Karakteristik Sosial. Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman, 4(1).

Argenti, G., & Istiningdias, D. S. (2017). Pemikiran Politik Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin. Jurnal Politikom Indonesiana, 2(2).

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2021). Situasi Politik dan Keamanan Provinsi Banten 2021. Serang: BPS Banten.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2023). [Metode Baru 2021] Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten Menurut Indikator 2021–2022. Serang: BPS Banten.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Bahar, S. (2008). Kebijakan Negara dalam Rangka Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Masyarakat (Hukum) Adat di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII.

Center for Strategic and International Studies. (2022). Pemilih Muda dan Pemilu 2024: Dinamika dan Preferensi Sosial Politik Pascapandemi. Jakarta: CSIS.

Cholisin. (2009). Sistem Politik Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan (Edisi ke-3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fadli, R. F. (2020). Tinjauan Filsafat Humanisme: Studi Pemikiran Paulo Freire dalam Pendidikan. Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 9(1).

Fajar, W. N. (2014). Pelaksanaan Pendidikan Politik di Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. Jurnal Khazanah Pendidikan, 6(2).

Fakih, M., dkk. (1999). Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis. Yogyakarta: Insist & Pustaka Pelajar.

Faqih, M. I., Abdurrahman, A., & Zairudin, A. (2022). Urgensi Pendidikan Politik dan Pemilu terhadap Pemilih Pemula. Community Development Journal, 3(3), 1809–1815.

Freire, P. (1985). The Politics of Education: Culture, Power, and Liberation. South Hadley: Bergin & Garvey.

Isnaini, N. A., & Rasmuin, R. (2022). Pendidikan Politik pada Pondok Pesantren Abu Manshur Kabupaten Cirebon. AL-MANAR: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, 11(1), 38–50.

Juwandi, R., dkk. (2019). Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Politik untuk Mengembangkan Literasi Digital Warga Negara. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP, 2(1).

Komara, E. (2016). Sistem Politik Indonesia Pasca-Reformasi. SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 2(2). https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2814

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten. (2023). Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Provinsi Banten. Serang: KPU Banten.

Laksmitha, N., & Susanto, H. (2019). Partisipasi Politik Generasi Milenial di Instagram dalam Pemilu 2019. Koneksi, 3(1).

Listiyaningsih. (2010). Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pembangunan di Banten. Jurnal Administrasi Publik, 1(2).

Masyhud, M. S. (2003). Manajemen Pondok Pesantren. Jakarta: Diva Pustaka.

Megawati, M., & Padang, A. T. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. SIYASATUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, 1(3), 522–532.

Muhamad Afied Hambali. (2014). Pemilukada Pasca-Reformasi di Indonesia. RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, 8(1).

Nurdiansyah, E. (2015). Implementasi Pendidikan Politik bagi Warga Negara dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia. Jurnal Bhineka Tunggal Ika, 2(1).

Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 44–51.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023–2026, Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022.

Sopi'i. (2014). Pondok Pesantren dan Pendidikan Politik: Kajian Historis di Pondok Pesantren Al-Ishlah Kecamatan Compreng Kabupaten Subang 1999–2014. Universitas Pendidikan Indonesia.

Surbakti, R. (1999). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Susanto, D. R., & Irwansyah. (2021). Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial di Era Pasca-Reformasi. Jurnal Lontar, 9(1).

Sutrisman, D. (2019). Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa. Guepedia.

Triaditya Rahman Hamid. (2022). Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Upaya Penyetaraan Hak Pilih pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2020. IPDN.

Zamroni. (2000). Pendidikan untuk Demokrasi (Civil Society). Jakarta: Bigraf Publishing